

RADAR SEMARANG

Halaman 2

Edisi Sabtu, 7 November 2015

Pemda Belum Siap Terapkan SAP Akrua

SEMARANG - Meski penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual di pemerintah daerah (pemda) telah diwajibkan pada 2015, namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala. Salah satunya sumber daya manusia (SDM) yang belum memenuhi syarat kompetensi dan perangkat regulasi serta sistem aplikasi yang digunakan pemda dalam implementasi SAP berbasis akrual belum selaras.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo dalam acara Penyerahan Laporan Hasil

Pemeriksaan dan Pemaparan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Acara digelar di Gedung BPK Perwakilan Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang, Jumat (6/11).

Hery menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam implementasi SAP berbasis akrual di delapan entitas yang terdiri dari satu provinsi (Jawa Tengah), dua Kota (Surakarta dan Magelang) dan lima Kabupaten (Bojonegara,

Purworejo, Batang, Pekalongan, Semarang). Dari hasil pemeriksaan itu, diperoleh gambaran kendala-kendala yang harus segera dicarikan solusi.

"Selain SDM, beberapa pemda belum memiliki dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Pemda juga berpotensi mengalami kesulitan dalam penyajian kembali laporan tahun sebelumnya di awal penerapan SAP berbasis akrual," bebernya.

Atas pemeriksaan beberapa pemda tersebut, lanjut Hery, diharapkan menjadi bahan atau gambaran bagi pemda lainnya

yang tidak dijadikan uji petik untuk mendapatkan pembelaan dan memperbaiki upaya yang telah dilakukan.

"Hal ini dilakukan agar opini yang telah diraih sebelumnya tidak mengalami penurunan," tandas pria yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Auditorat IIIA Auditorat Utama Keuangan Negara III itu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berupaya melakukan transparansi dalam setiap penganggaran. Salah satunya dengan menginformasikan

melalui media massa.

"Namun faktanya masih *dicuekin*. Pada 2016 mendatang kita siapkan *e-planning*," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dalam sambutannya mendukung sepenuhnya upaya Pemprov dalam mendorong kepala daerah untuk tidak ragu dalam melakukan penyerapan anggaran. Menurutnya, jika hal itu dilakukan dengan baik maka tidak akan terjadi tindak penyelewengan. "Tidak ada alasan takut untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal. Kita sudah bertemu dengan Kejaksaan maupun Kepolisian," tandasnya. (fai/ric)